

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*illegal acts*) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) untuk keuntungan pribadi/ kelompok secara tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain (Wahyuni, 2019). Kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji pada penyajian laporan keuangan dengan mengurangi bahkan menambah nilai dari beberapa akun secara sengaja (Ramadhani dan Nurbaiti, 2020). Dari segi perusahaan, *fraud* pada laporan keuangan menyebabkan informasi di dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan salah saji material yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang berkepentingan (Khairi dan Alfarisi, 2019). Para investor harus berhati-hati dalam melakukan penanaman modal agar tidak menjadi korban kerugian laporan keuangan.

Laporan dikatakan andal jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut telah bebas dari kesalahan yang merugikan, material, dan dapat diandalkan sebagai informasi jujur yang dapat disajikan (Khairi dan Alfarisi, 2019). Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari kesalahan pencatatan aset, penjualan dan laba, atau pencatatan yang lebih rendah terhadap kewajiban, beban

dan kerugian (Sari *et al.*, 2019). Kecurangan (*fraud*) harus diminimalisir untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa yang akan datang.

Noch *et al.* (2019) kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) merupakan ancaman yang terus berkembang. Di Indonesia kasus kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya tindakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi.

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas ataupun pihak lain. Kecurangan akuntansi sendiri berkaitan dengan memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen atau bukti penipuan, dan kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan (Hariani, 2021).

Menurut Chandrayatna dan Ratnasari (2019) kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, faktor dari dalam diri individu (internal) dan faktor organisasi (eksternal). Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* titik rawan terjadinya kecurangan yakni proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penyediaan barang dan jasa, proses pertanggung jawaban, serta proses pemantauan dan pengevaluasian (Cahyadi, 2020). Kecurangan yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan maupun swasta adalah *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *fraudulent*

statement (kecurangan laporan keuangan), *corruption* (korupsi). Kecurangan akuntansi tersebut dapat merugikan suatu negara. Kecurangan akuntansi biasanya terjadi karena adanya salah saji dalam laporan keuangan sehingga dapat merugikan suatu pengguna laporan keuangan. Menurut laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2020, berdasarkan frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul oleh korupsi (*corruption*) dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Menurut UU No. 254 Tahun 1960 korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Korupsi dapat berdampak pada kerugian keuangan suatu negara, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kriminalitas yang semakin naik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

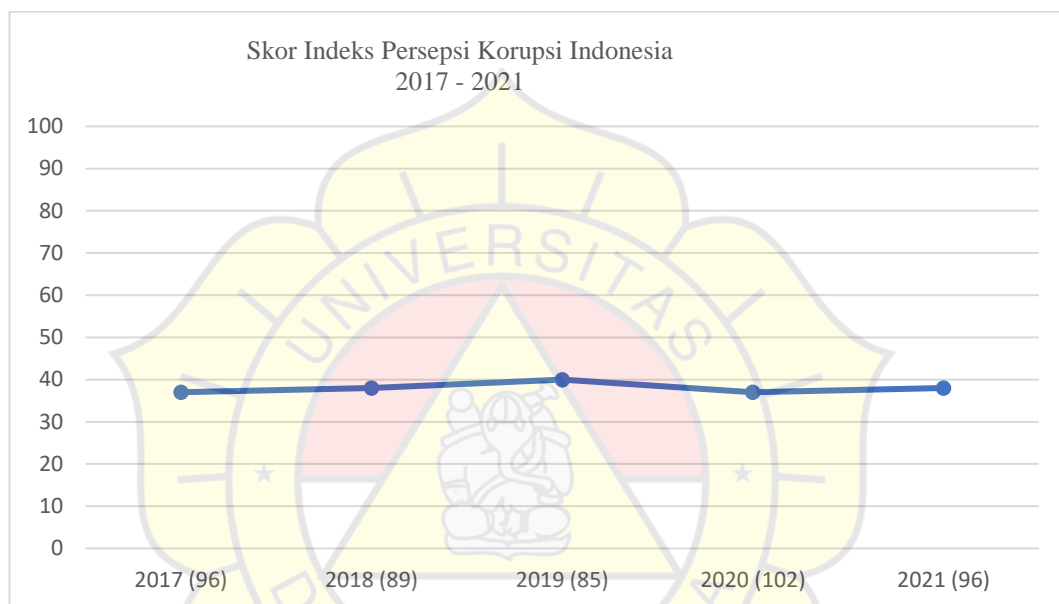
Tabel 1.1
Indeks Persepsi Korupsi Negara Asean
Tahun 2017-2021

No.	Negara	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rank	CPI	Rank	CPI	Rank	CPI	Rank	CPI	Rank	CPI
1	Singapore	6	84	3	85	4	85	3	85	4	85
2	Brunei Darussalam	32	62	31	63	35	60	35	60		
3	Malaysia	62	47	61	47	51	53	57	51	61	48
4	Indonesia	96	37	89	38	85	40	86	37	96	38
5	Philippines	91	34	99	36	93	34	102	34	87	33
6	Thailand	107	37	99	36	93	34	104	36	96	35
7	Vietnam	111	35	117	33	113	37	115	36	117	39
8	Laos	135	29	132	29	130	29	134	29	134	30
9	Myanmar	130	30	132	29	130	29	137	28	137	28
10	Cambodja	161	21	161	20	162	20	160	21	160	23

Sumber: *Transparency International, 2021*

Data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa skor nilai Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perceptions Indeks (CPI)* Indonesia adalah 38 pada skala 0-100 dan Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara dalam persepsi korupsi pada tahun 2021.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017-2021



Sumber : Transparency International
Semakin rendah skor, semakin parah persepsi korupsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) di Indonesia sebesar 3,88 pada 2021. Angka tersebut meningkat 0,15 poin dibandingkan pada 2020 yang sebesar 3,68. Sementara, indeks dimensi pengalaman tercatat sebesar 3,90. Skor dimensi tersebut mengalami penurunan 0,01 poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 3,91. Dilihat berdasarkan wilayahnya, IPAK pada 2021 lebih tinggi berasal dari perkotaan, yakni sebesar 3,92. Sedangkan, IPAK di pedesaan mencapai 3,83 pada tahun ini.

Adapun kasus yang mengejutkan masyarakat adalah kasus dugaan korupsi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ABT Holding Company yang merugikan negara Rp 1,2 miliar tahun anggaran 2019-2021 (11 Oktober 2022). Perbuatan tersangka tidak bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan ABT Finance dan BUMDes ABT Holding Company. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Permendes PDPTT Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDes, Pasal 10 AD/ ART ABT Holding Company dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Lampung Utara.

Kasus kecurangan lain yaitu pada Holding Company Ternate Bahasi Berkesan pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh Ramdani Abubakar selaku selaku direktur di perusahaan tersebut. Ramdani ditahan karena diduga terlibat korupsi anggaran penyertaan modal Perusa Bahari Berkesan Ternate tahun 2016-2018 lebih dari Rp 25 miliar.

Penyebab dari terbukanya ruang atas kecenderungan kecurangan akuntansi adalah pengendalian internal yang lemah. Pengendalian internal (*internal control*) merupakan bagian dari perencanaan sebuah organisasi untuk mengamankan aset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal (Sari *et al.*, 2021). Pengendalian internal merupakan komponen awal dalam sistem pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang

mencerminkan sikap manajemen organisasi (Saparman *et al.*, 2020). Pengendalian internal bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, kendala laporan keuangan dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku (Herawaty & Hernando, 2020). Peneliti terdahulu menunjukkan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Idris, 2020; Sujana *et al.*, 2020; Sariat *et al.*, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2018; Irwansyah & Bambang, 2019) dengan hasil penelitian efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Suarniti & Sari (2020) kesesuaian kompensasi merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kompensasi yang sesuai akan memberikan kepuasan kepada karyawan sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melaksanakan tugas keorganisasian menurut (Ermawati & Barlian, 2018). Hasil penelitian (Irwansyah & Bambang, 2019; Karsam *et al.*, 2019) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Suartini & Sari (2020) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, perusahaan, dan karyawan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait hal dan kewajiban dalam mengendalikan perusahaan (Herawati & Hendro, 2020).. Hasil penelitian (Rowa, 2019; Rustandy, 2020; Samanto., 2022) menunjukkan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif serta signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin kuatnya *Good Corporate Governance* diterapkan, maka hasil tersebut dapat memiliki dampak pada meningkatnya pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil penelitian (Patriani & Tri 2018) *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ketaatan aturan akuntansi akan membuat seluruh laporan yang ada disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Taat pada aturan akuntansi akan membuat seluruh laporan tersebut jelas, mudah dipahami, dan tentunya akan membuat laporan yang ada tidak bisa dimanipulasi. Penetapan aturan akuntansi membuat rendahnya kecurangan di dalam sebuah organisasi (Juliantari *et al*, 2020). Hasil penelitian Rodiah *et al.*(2019) menunjukkan hasil ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian (Rahma & Haryoso, 2019) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang berupa fenomena dan *research gap* dan *novelty* maka penulis mengklasifikasikannya sebagai berikut: (1) terdapat

beberapa indikator yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, diantaranya efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, *good corporate governance*, dan ketaatan aturan akuntansi. Namun, dari hasil literatur terdahulu masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian, (2) belum ditemukan penelitian tentang kecenderungan akuntansi pada Rodamas Group. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, *Good Corporate Governance*, dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Rodamas Group Jakarta)”**.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, yaitu:

- a. Laporan keuangan yang dimanipulasi atau salah saji dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan pengguna laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak relevan dapat menyesatkan berbagai pihak terutama para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Diperlukannya teknik analisis laporan keuangan dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menghasilkan hasil yang baik, maka dilakukan pembatasan agar penelitian lebih terfokus. Objek penelitian ini adalah Rodamas Group (Perusahaan Manufaktur) yang beroperasi di Jakarta Barat. Penelitian ini akan menggunakan empat variabel yang signifikan untuk mendeteksi kecurangan akuntansi, yaitu:

- a. Efektivitas pengendalian internal.
- b. Kesesuaian kompensasi.
- c. *Good Corporate Governance*.
- d. Ketaatan aturan akuntansi.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat hubungan negatif antara efektivitas pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi?
- b. Apakah terdapat hubungan negatif antara kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi?
- c. Apakah terdapat hubungan negatif antara *good corporate governance* dengan kecenderungan kecurangan akuntansi?
- d. Apakah terdapat hubungan negatif antara ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terdapat hubungan negatif antara efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- b. Untuk mengetahui terdapat hubungan negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- c. Untuk mengetahui terdapat hubungan negatif antara *good corporate governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- d. Untuk mengetahui terdapat hubungan negatif antara ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, *good corporate governance*, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi mengenai hal:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang *fraud* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai *fraud* khususnya di bidang perusahaan swasta.
- b. Bagi objek penelitian, Rodamas Group, dapat bermanfaat untuk karyawan sebagai masukan dalam mencegah adanya kecurangan (*fraud*) di sektor entitas swasta.

